

PELUANG PASAR DAN KONFLIK ETNIK : KASUS PEMBAKARAN PASAR ABEPURA, IRIAN JAYA

Suharman

Pendahuluan

Irian Jaya sebagai salah satu wilayah paling timur Indonesia, dalam beberapa tahun terakhir ini kembali menarik perhatian karena munculnya berbagai masalah yang terjadi. Ketika Republik Indonesia diproklamakan pada 17 Agustus 1945, wilayah ini masih berada di bawah kekuasaan kolonial Hindia Belanda. Setelah melalui perjuangan politik dan diplomatik, pada tahun 1963 wilayah ini diambil alih oleh PBB melalui UNTEA. Dalam masa itu, dalam wilayah ini telah berkembang perbedaan pandangan antara kelompok yang pro integrasi dan yang tidak menginginkan integrasi. Baru ketika Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) dilakukan tahun 1969, wilayah ini secara resmi menjadi salah satu propinsi di Indonesia.

Meskipun demikian, permasalahan yang ada nampaknya tidak makin berkurang. Selain bersumber pada masalah pro dan kontra integrasi, masalah lain yang muncul berkaitan dengan proses pembangunan yang berjalan di wilayah ini. Datangnya berbagai suku bangsa lain di wilayah ini serta interaksi sosial yang terjadi antar mereka, ternyata telah menghasilkan serangkaian masalah sosial baru. Pelaksanaan berbagai program pembangunan, terutama pembangunan ekonomi, ternyata telah menghasilkan berbagai masalah baru dalam dimensi

yang lebih luas. Majalah GATRA (30 Maret 1996:25) menggambarkan situasi terakhir di Irian Jaya yang berupa kerusuhan-kerusuhan yang silih berganti dengan ungkapan, "bagaikan mosaik yang terbentuk dari kepingan beraneka warna". Dari kenyataan yang ada tersebut, sejumlah pertanyaan yang dapat diajukan adalah, apa yang sebenarnya terjadi di Irian Jaya?. Mengapa dan bagaimana konflik sosial itu muncul?. Walaupun dalam beberapa hal dirasakan segi positifnya, mengapa pelaksanaan berbagai program pembangunan di Irian Jaya justru menjadi pelipat ganda konflik sosial?. Bagaimana kemungkinan munculnya konflik etnik di Irian Jaya di masa depan?. Berbagai pertanyaan inilah yang membimbing tulisan ini untuk mencoba memahami mengapa dan bagaimana konflik sosial itu muncul di Irian Jaya.

Kerangka Konseptual

Kondisi masyarakat Irian Jaya dewasa ini menunjukkan dengan sangat jelas karakternya sebagai masyarakat yang majemuk. Hal ini ditandai dengan adanya keragaman etnik, budaya, agama, tingkat pendidikan, kemampuan ekonomi, dan sebagainya. Keragaman budaya sangat nampak jelas dalam kehidupan masyarakat Irian Jaya. Selain keragaman budaya yang demikian, perbedaan kemampuan memanfaatkan peluang yang

ada pada masing-masing kelompok sosial/suku yang ada, baik penduduk asli maupun para pendatang, pada dasarnya berbeda-beda. Dalam kaitannya dengan kemampuan memanfaatkan peluang inilah kemudian muncul berbagai bentuk kesenjangan sosial.

Secara umum, keragaman dan kesenjangan sosial dalam masyarakat Irian Jaya ini bersumber dari adanya parameter nominal maupun parameter "graduated". Bekerjanya dua parameter struktur sosial tersebut dapat menghasilkan heterogenitas maupun kesenjangan sosial (Nasikun, 1994:8). Heterogenitas dan kesenjangan menciptakan hambatan bagi terjadinya hubungan-hubungan sosial diantara anggota masyarakat. Oleh karena secara sosiologis dinyatakan bahwa keanggotaan di dalam kelompok yang sama dan kedekatan status sosial mendorong terjadinya asosiasi sosial, maka makin tinggi tingkat heterogenitas dan atau kesenjangan sosial suatu masyarakat, makin besar hambatan yang timbul bagi terjadinya hubungan-hubungan sosial diantara anggotanya atau terjadinya integrasi sosial.

Masyarakat Irian Jaya dengan kondisinya yang demikian memberikan gambaran yang sangat jelas sebagai masyarakat yang majemuk. Menurut Furnivall (Shepsle, 1972: 10), masyarakat majemuk (*plural society*) merupakan suatu masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih elemen dan tatanan sosial yang hidup berdampingan tetapi tidak terintegrasi dalam satu kesatuan politik. Furnivall terutama menekankan pada aspek ekonomi dalam melihat masyarakat Indonesia yang majemuk ini, dengan melihat adanya pemilahan aktifitas ekonomi yang konkuren dengan pemilahan etnik. Media atau tempat yang dapat mempertemukan berbagai etnik itu hanyalah pasar (*marketplace*). Sedangkan M.G. Smith (Shepsle, 1972: 15) melihat masyarakat majemuk juga memiliki pemilahan

organisasi sosial, kelembagaan serta sistem kepercayaan dan nilai-nilainya.

Suatu pengembangan konsep masyarakat majemuk yang lebih memadai dikemukakan oleh Robuskha dan Shepsle (1972:62) yang menyatakan bahwa masyarakat majemuk dapat diidentifikasi melalui: (1) keragaman budaya, (2) komunitas kultural yang terorganisasi secara politik dan (3) saliensi etnisitas. Oleh karena setiap masyarakat memiliki keragaman kultural, maka dua cirinya yang terakhir (*politik etnik*) inilah yang membedakan antara masyarakat pluralistik (*pluralistic society*) dengan masyarakat majemuk (*plural society*). Oleh karena konfigurasi strukturalnya, masyarakat majemuk memiliki dua kecenderungan: (1) inklinasi berkembangnya perilaku konflik diantara berbagai kelompok etnik, dan, (2) kecenderungan hadirnya "force" sebagai kekuatan integratif utama yang mengintegrasikan masyarakat (Nasikun, 1989:4).

Karakter sebagai masyarakat majemuk yang demikian sangat jelas terlihat dalam masyarakat Irian Jaya dewasa ini. Dengan karakter yang demikian itu pada kenyataannya telah mengakibatkan hubungan sosial dan integrasi sosial di Irian Jaya mengalami hambatan yang serius. Dari berbagai bentuk hambatan yang terjadi dapat dilihat kompleksnya permasalahan sosial yang ada, yang secara tidak langsung menggambarkan masyarakat Irian Jaya merupakan masyarakat majemuk yang multidimensional. Artinya, terdapat banyak parameter struktur sosial bekerjanya yang saling mempengaruhi dan saling tumpang tindih.

Hambatan yang demikian makin nampak dengan jelas jika diferensiasi sosial berdasarkan parameter suku bangsa (etnik) jatuh berhimpitan (*coincided*) dengan parameter lain (agama, kelas ekonomi, bahasa), sehingga sentimen-sentimen yang bersumber dari parameter struktur sosial yang satu

cenderung berkembang saling mengukuhkan dengan sentimen-sentimen yang bersumber dari diferensiasi sosial berdasarkan parameter yang lain. Konsolidasi parameter struktur sosial (*concolidated social structure*) yang demikian menurut Peter Blau merupakan kendala yang paling besar bagi tercapainya integrasi sosial (Nasikun, 1989:5).

Masuknya berbagai program pembangunan di wilayah ini juga dapat menyumbang terciptanya hambatan bagi terjadinya integrasi sosial. Kemampuan tiap kelompok suku bangsa (etnik) dalam merespon masuknya berbagai program pembangunan sangat berbeda. Pengalaman menunjukkan bahwa pendatang memiliki beberapa keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) dibandingkan penduduk Irian Jaya asli. Keunggulan ini antara lain disebabkan karena perbedaan latar belakang sejarah, budaya, kemampuan teknologi dan sebagainya. Semua itu merupakan mata rantai yang saling berkaitan dan secara politik ekonomi, menghasilkan suatu pola hubungan antar kekuatan ekonomi yang timpang, yang merupakan suatu proses yang mendorong konsentrasi kekuatan (politik dan ekonomi) pada kelompok tertentu dan memarjinalisasikan kelompok lain. Posisi tawar menawar (*bargaining position*) dengan demikian lebih kuat dimiliki oleh kelompok yang menguasai kekuatan politik maupun ekonomi (Pusat Penelitian Pedesaan dan Kawasan UGM, 1994:3).

Selain itu, hambatan untuk meraih manfaat dan peluang dari berbagai program pembangunan yang masuk juga bersumber dari persyaratan yang ditetapkan oleh berbagai program pembangunan itu sendiri. Kondisi yang demikian menjadi penyebab bekerjanya mekanisme dampak saring (*filtering effect*) (Pusat Penelitian Pedesaan dan Kawasan UGM, 1994:3). Peluang, sumber dan hasil-hasil pembangunan tidak

semuanya dapat diakses oleh kelompok yang tidak memiliki kemampuan dan tidak memenuhi persyaratan itu. Dengan mekanisme dampak saring itu menyebabkan kelompok yang memiliki kemampuan dapat menarik keuntungan dari peluang yang ada, sehingga akumulasi kekuatan politik maupun ekonominya menjadi kian bertambah sedangkan kelompok lain yang tidak mampu makin tergesur ke pinggiran. Konsep menetes ke bawah, dengan demikian, tertahan pada lapisan tertentu dalam masyarakat, yang berakibat pada makin melebarnya kesenjangan sosial yang ada dalam masyarakat. Dalam kondisi yang demikian, proses pembangunan bukan tidak mungkin justru melipat gandakan terjadinya kendala integrasi sosial.

Meskipun masalah sosial yang muncul di Irian Jaya dapat menjadi masalah yang memiliki skala internasional, akan tetapi tidaklah sejelas masalah Timor Timur dalam forum Internasional. Hal ini antara lain dengan adanya sikap tegas dari pemerintah Papua Nugini yang tidak mendukung adanya gerakan politik "Melanesia Raya" (Siagian, 1986:220-226). Akan tetapi, beberapa masalah aktual kembali menjadi perhatian dunia terutama dengan adanya kasus penyanderaan yang melibatkan warga negara asing di pedalaman Irian Jaya serta sorotan berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM), baik dalam maupun luar negeri, tentang masalah-masalah sosial yang muncul di wilayah ini.

Beberapa Sumber Konflik Etnik di Irian Jaya

Sungguhpun telah banyak mengalami pergeseran, kehidupan masyarakat Irian Jaya pada dasarnya masih sangat jelas ditandai oleh dominasi suku. Jumlah suku yang ada di Irian Jaya secara pasti sampai kini belum dapat diketahui, karena ada diantara suku ini

yang hidupnya masih mengembara¹ sehingga sering dikategorikan sebagai suku terasing dan belum diidentifikasi. Jaspian (Taneko, 1983) dengan mengambil patokan pada bahasa, daerah tempat tinggal, kebudayaan dan susunan masyarakatnya menyatakan Irian Barat (Irian Jaya) terdiri dari 49 suku bangsa.

Setiap suku yang ada di Irian Jaya pada dasarnya memiliki kebudayaan yang berbeda dari suku lainnya. Oleh karena kebudayaan merupakan *blueprint of behavior* atau *design for living* (Soerjono Soekanto, 1981:46), maka perbedaan budaya ini telah menyebabkan perbedaan antar suku menjadi sangat jelas dalam hal cara hidup dan cara berfikir atau memahami sesuatu. Identitas kultural ini kemudian melahirkan sentimen primordial yang secara sistematis berpengaruh terhadap kohesi sosial, kompetisi dan interaksi sosial dalam masyarakat majemuk (Shepsle, 1972:8).

Perbedaan identitas kultural ini dapat menjadi sumber konflik yang ada dalam masyarakat Irian Jaya, misalnya dalam bentuk perang antar suku yang beberapa tahun silam masih terjadi di Irian Jaya². Sentimen primordial kesukuan ini juga dapat menjadi basis utama artikulasi kepentingan secara politik, sebagaimana sekarang ini dikembangkan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM). Oleh karena tersumbatnya komunikasi politik melalui saluran yang ada, gerakan ini mengartikulasikan kepentingan politik dengan berbagai cara. Hal ini nampak antara lain dalam bentuk beberapa kasus penyanderaan yang berlangsung di beberapa wilayah Irian Jaya dalam tahun 1996 ini.

Berhadapan dengan para pendatang, perbedaan identitas kultural di antara suku-suku asli Irian Jaya ini mengendur karena muncul solidaritas sosial sebagai akibat dari banyak kesamaan kondisi, perlakuan maupun perasaan tersingkir. Selain karena campur tangan ABRI dan aparat pemerintah,

diduga melemahnya pertikaian antar sesama suku asli di Irian Jaya sebagian lain disebabkan oleh karena munculnya kesadaran sebagai penduduk asli yang berbeda dari para pendatang dalam banyak hal.

Interaksi suku-suku asli Irian Jaya dengan suku di luar Irian pada dasarnya telah berlangsung sejak lama. Aditjondro (1987) menunjukkan bahwa telah sejak lama terjadi interaksi antara penduduk asli Irian dengan masyarakat di luar Irian. Ketika wilayah Sorong mulai dikembangkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda pada tahun 1906 dan setelah Perang Dunia I usai, kedatangan penduduk dari luar Irian kian lama kian bertambah.

Arus migrasi masuk ke wilayah ini dari tahun ke tahun makin meningkat. Kedatangan para migran ke Irian Jaya ini tidak saja menghasilkan heterogenitas/ keragaman budaya yang makin kompleks, tetapi juga menghasilkan masalah sosial yang lain. Ditinjau dari data statistik yang ada, mayoritas migran yang masuk ke wilayah Irian Jaya adalah berasal dari Sulawesi Selatan dan Tenggara (Sulawesi), Jawa Tengah dan Jawa Timur (Jawa) dan Nusa Tenggara Timur (Bali dan Nusa Tenggara), seperti nampak dalam tabel berikut

1) Menurut Sianipar, Pegawai Departemen Sosial Jakarta yang telah bertahun-tahun menangani suku terasing di Irian Jaya, dalam suatu perbincangan dengan penulis tahun 1988, pernah menemukan adanya suku yang selalu berpindah-pindah, melintasi batas antar negara dan rotasi ini akan sampai kembali di tempat awalnya selama kurang lebih 100 tahun kemudian.

2) Pernyataan ini disampaikan oleh Kharis Soehoed (mantan Ketua DPR MPR RI) dalam kapasitasnya sebagai Ketua Yayasan Pengembangan Asmat, di depan Peserta Karya Bakti Sosial Asmat, tahun 1988, di Departemen Sosial Republik Indonesia, Jakarta

Tabel: 1
Persentase Migrasi Masuk Semasa Hidup ke Irian Jaya
Menurut Pulau atau Propinsi Tahun 1980 dan 1990

| No. | Propinsi/Pulau Asal. | Tahun 1980 (%) | Tahun 1990 (%) |
|-----|----------------------|----------------|----------------|
| 1. | DI Aceh | 0.12 | 0.26 |
| 2. | Sumatera Utara | 2.15 | 2.45 |
| 3. | Sumatera Barat | 0.60 | 0.54 |
| 4. | Riau | 0.02 | 0.14 |
| 5. | Jambi | 0.06 | 0.08 |
| 6. | Bengkulu | 0.45 | 0.39 |
| 7. | Sumatera Selatan | 0.15 | 0.14 |
| 8. | Lampung | 0.58 | 0.73 |
| | Sumatera | 4.13 | 4.70 |
| 9. | DKI Jakarta | 1.60 | 1.38 |
| 10. | Jawa Barat | 5.16 | 4.90 |
| 11. | Jawa Tengah | 9.68 | 21.24 |
| 12. | DIY | 0.82 | 1.59 |
| 13. | Jawa Timur | 7.94 | 22.40 |
| | Jawa | 25.20 | 51.51 |
| 14. | Bali | 0.16 | 0.39 |
| 15. | Nusa Tenggara Barat | 0.27 | 0.62 |
| 16. | Nusa Tenggara Timur | 2.06 | 2.27 |
| 17. | Timor Timur | 0.03 | 0.12 |
| | Bali dan NT | 2.52 | 3.40 |
| 18. | Kalimantan Barat | 0.24 | 0.13 |
| 19. | Kalimantan Tengah | 0.06 | 0.08 |
| 20. | Kalimantan Selatan | 0.20 | 0.27 |
| 21. | Kalimantan Timur | 0.46 | 0.18 |
| | Kalimantan | 0.97 | 0.66 |
| 22. | Sulawesi Utara | 4.98 | 3.40 |
| 23. | Sulawesi Tengah | 0.50 | 0.41 |
| 24. | Sulawesi Selatan | 35.68 | 22.21 |
| 25. | Sulawesi Tenggara | 4.30 | 2.19 |
| | Sulawesi | 45.46 | 28.21 |
| 26. | Maluku | 18.55 | 10.92 |
| 27. | Irian Jaya | - | - |
| | Maluku dan Irija | 18.55 | 10.92 |
| 28. | Luar Negeri | 1.50 | 0.60 |
| 29. | TT | 1.67 | - |
| | Total % | 100.00 | 100.00 |
| | N | 96079 | 262873 |

Sumber : Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada, 1993. (Diolah dari Tabel 3.7 dan 3.8).

Perbedaan budaya antara pendatang dan penduduk asli ini ditandai dengan penggunaan bahasa lokal yang berlainan, sungguhpun bahasa Indonesia tetap dipergunakan sebagai bahasa pergaulan sehari-hari. Penggunaan bahasa lokal dapat menciptakan *eksklusivisme* diantara etnik yang berbeda, yang tidak jarang menjadi dasar kecurigaan antar etnik dan sumber kesalah-pahaman. Perbedaan ini juga dipertegas dengan adanya perbedaan agama yang dianut. Perbedaan ini memang tidak menjadi sumber utama perbedaan, mengingat pada tingkat tertentu agama justru sebaliknya merupakan parameter yang dapat mengintegrasikan berbagai kelompok etnik yang berbeda.

Masuknya program transmigrasi ternyata juga menimbulkan masalah cukup serius di Irian Jaya. Selain konflik penggunaan lahan, pengusuran hak adat atas hutan, terusiknya tradisi lokal, pergeseran pola makanan pokok, yang lebih utama adalah terjadinya benturan kepentingan ekonomi antara transmigran dan penduduk asli (Loekman Soetrisno, 1986). Selain itu, transmigran sering mendapat perlakuan lebih baik dari Pemerintah dalam berbagai hal sehingga lokasi pemukiman transmigran sering mendapatkan fasilitas infrastruktur yang lebih lengkap dari lingkungan pemukiman asli sekitarnya. Keadaan ini menjadi sumber kecemburuan sosial dan penolakan terhadap para transmigran pendatang serta munculnya isu Jawanisasi di lokasi tersebut.

Kesenjangan antara masyarakat transmigran dengan penduduk asli juga diperlebar dengan adanya kemampuan lebih baik masyarakat transmigran merespon berbagai pelayanan publik dalam bidang pertanian yang diberikan oleh pemerintah bagi masyarakat dibandingkan dengan masyarakat lokal. Masyarakat transmigran secara umum memiliki pengalaman sosial yang lebih baik

dibandingkan dengan penduduk asli, terutama dalam memberikan respon terhadap berbagai program pembangunan yang ada. Gambaran perbandingan itu ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel: 2
Perbandingan Akses Masyarakat pada Pelayanan Publik

| Kelompok Masyarakat | Dinas Pertanian | Dinas Peternakan | Dinas Perkebunan | Dinas Perikanan | Bimas | Koperasi |
|------------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-------|----------|
| Masyarakat Transmigran | *** | *** | ** | ** | *** | *** |
| Penduduk Asli | * | ** | ** | *** | ** | 0 |

Keterangan : *** = besar, ** = sedang, * = kecil dan 0 = tak ada
Sumber : Harry (1991:58).

Dari data di atas nampak bahwa masyarakat transmigran mendapatkan akses lebih baik dalam pelayanan publik pada beberapa layanan yang diberikan oleh instansi pemerintah. Dalam bidang tanaman pangan misalnya, petani transmigran memiliki peluang memanfaatkan pelayanan publik lebih baik karena banyak faktor yang mendukungnya, misalnya kesiapan lahan, telah adanya kelompok tani yang dibina PPL, kemungkinan memenuhi persyaratan mendapat kredit dan sebagainya. Pertanian yang dikembangkan penduduk asli pada umumnya tersebar sehingga peranan PPL sangat kecil, kelembagaan seperti kelompok tani belum berkembang dan memiliki hambatan prosedural-administratif untuk mendapatkan kredit (Harry, 1991:53-57). Kondisi ini jelas akan menciptakan kesenjangan yang kian lebar antara penduduk asli yang mengembangkan pertanian dengan para transmigran.

Masalah sosial lain yang muncul adalah kesenjangan sosial antar suku yang

ada, terutama antara penduduk asli dengan pendatang. Kesenjangan ini terutama bersumber dari perbedaan kemampuan yang dimiliki oleh penduduk asli dan pendatang dalam memanfaatkan *life chance* yang ada. Kemampuan ini sangat ditentukan oleh banyak hal, misalnya kekayaan sumber daya alam yang ada, kemampuan teknologi yang ada dalam tiap suku bangsa, kemampuan memanfaatkan peluang ekonomi dan sebagainya.

Kesenjangan ini makin diperburuk dengan adanya perbedaan yang amat tajam antara kondisi perkotaan dengan kondisi pedesaan. Langkanya sarana dan prasarana di pedesaan di satu pihak menyebabkan komunikasi dan transportasi tidak lancar. Di lain pihak, kondisi perkotaan yang memiliki relatif lebih lengkap fasilitas sosial dan ekonomi, memberikan gambaran peluang kesempatan kerja, telah menarik banyak penduduk pedesaan menuju kota-kota yang ada di Irian Jaya. Akan tetapi, keterbatasan kemampuan dan kualitas tenaga kerja lokal menyebabkan mereka kalah dalam persaingan dengan para pendatang³. Kondisi ini menciptakan iklim yang makin tidak kondusif bagi terciptanya integrasi sosial di Irian Jaya.

Secara umum sebagian besar desa-desa di Irian Jaya masih berada pada tahap pra-desa. Berdasarkan Undang-undang Nomer 5 Tahun 1979 tentang Desa dan Kelurahan maka berbagai unit sosial dan kesatuan hukum adat yang ada di wilayah Indonesia diarahkan ke dalam bentuk desa ini. Penyeragaman ini jelas menimbulkan banyak masalah di Luar Jawa, seperti halnya di Irian Jaya. Pada umumnya unit sosial yang dominan di Irian Jaya bukan merupakan kesatuan administratif tetapi lebih merupakan kesatuan adat. Oleh karena itu, sebenarnya desa-desa di Irian sangat berbeda dibandingkan dengan desa-desa di Jawa.

Dalam perkembangannya kemudian memang ada beberapa desa yang mampu

berkembang menyerupai desa-desa di Jawa. Meskipun demikian, perkembangan sebagian besar desa-desa yang lain di Irian Jaya masih mengalami banyak hambatan. Kurangnya berbagai fasilitas di pedesaan menyebabkan ketertinggal wilayah desa menjadi kumulatif sifatnya. Meskipun desa miskin juga terdapat di wilayah perkotaan akan tetapi sebagian besar desa miskin di Irian Jaya mengumpul di wilayah pedesaan. Gambaran secara rinci seperti ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel : 3
Jumlah dan Presentase Desa
Perkotaan dan
Desa Pedesaan dengan Status Miskin
tahun 1993

| Indikator | Desa Perkotaan | Desa Pedesaan | Total Perkotaan dan Pedesaan |
|------------------------|----------------|---------------|------------------------------|
| Banyaknya desa Miskin | 7 | 1.731 | 1.738 |
| Persentase desa Miskin | 11,7 | 79,3 | 77,5 |
| Total Jumlah Desa | 60 | 2.182 | 2.242 |

Sumber : Diolah dari Rachbini (1994:217).

Dari data di atas secara jelas terlihat gambaran tentang desa miskin yang ada di wilayah perkotaan dan pedesaan Irian Jaya. Jikalau desa-desa ini tergolong miskin, hal ini bukan berarti tidak ada sumber ekonomi yang dapat

³ Ungkapan yang sangat tepat dikemukakan dalam suatu tulisan di Harian KOMPAS dengan judul "Antara Kota dan Desa" (Selasa, 9 April 1996) dan "Penonton Abadi di Kampungnya" (Rabu, 10 April 1996).

dimanfaatkan, tetapi lebih disebabkan karena pengaturan yang kurang adil sehingga desa-desa di Irian Jaya dan Indonesia bagian timur lainnya, kurang menampakkan pertumbuhan yang memadai sehingga disparitas antar wilayah terlihat makin jelas (Rachbini, 1994:216). Pada gilirannya kondisi pedesaan yang demikian telah memacu migrasi penduduk ke luar wilayah desa, terutama ke wilayah perkotaan, bahkan ke luar pulau Irian.

Peluang dan Dominasi Ekonomi

Sebagai suatu masyarakat yang majemuk, masyarakat Irian Jaya dewasa ini ditandai oleh adanya sekat-sekat sosial, terutama yang secara jelas memisahkan antar penduduk asli dengan pendatang. Penduduk asli berjalan dengan budayanya sendiri sedangkan para pendatang juga demikian, sedang satu-satunya tempat bertemunya dua kelompok yang tersekat ini hanya terjadi di pasar (Loekman Soetrisno, 1996).

Dualisme ekonomi dalam masyarakat Irian Jaya juga terlihat dari struktur ekonominya. Menurut Kakisina (1993:9) struktur ekonomi Irian Jaya masih tetap memperlihatkan cirinya yang dualistik, dimana pada tahun 1990 pendapatan per kapita penduduk di sektor tradisional yang memberikan lapangan kerja bagi 82 % penduduk adalah Rp 264.672,- sedangkan sektor modern yang memberikan lapangan pekerjaan bagi 18 % penduduk sebesar Rp 2.000.000,-. Sektor modern bersifat *enclave* dengan orientasi produksi untuk ekspor baik ke luar wilayah maupun ke luar negeri.

Lemahnya kewiraswastaan di Irian Jaya dalam pandangan Kakisina (1993:11) tidak hanya bersumber pada masalah kultural, tetapi struktural. Struktur dunia usaha yang ada di Irian Jaya juga menunjukkan adanya dualisme, bukan hanya modern-tradisional tetapi sektor modern dikuasai oleh para pendatang,

sedangkan sektor tradisional dikuasai oleh penduduk asli orang Irian Jaya. Diperkirakan terdapat 4 % pengusaha WNI keturunan Cina dan 6 % pengusaha Bugis, Buton dan Makasar yang menguasai sebagian besar ekonomi menengah sedangkan 90% pedagang asli Irian menguasai ekonomi lemah.

Para pendatang pada umumnya memiliki pengalaman, kemampuan dan ketrampilan ekonomi yang lebih baik dari penduduk asli. Kemampuan yang dimiliki ini menyebabkan para pendatang mampu memanfaatkan peluang ekonomi yang ada secara lebih baik dari pada penduduk asli. Bagi masyarakat asli Irian Jaya, ekonomi uang merupakan sesuatu yang relatif baru. Selama ini pola *barter* merupakan pola yang dominan diantara mereka. Berdagang merupakan sesuatu yang baru bagi sebagian besar penduduk asli Irian Jaya, terutama di pedalaman.⁴ Ungkapan yang sangat tepat dikemukakan dalam suatu tulisan di Harian KOMPAS dengan judul "Antara Kota dan Desa" (Selasa, 9 April 1996) dan "Penonton Abadi di Kampungnya" (Rabu, 10 April 1996). Oleh sebab itu, makna dan nilai uang bagi masyarakat yang demikian sangat berbeda dari masyarakat yang telah sejak lama mengenal uang sebagai alat pertukarannya.

Kemampuan manajerial para pendatang dalam mengelola dan

4) Penulis mengalami sendiri bagaimana penduduk Suku Asmat di Desa Surui Kecamatan Agast, Merauke menjajakan patung-patung dengan malu-malu. Patung itu hanya dibawa kesana kemari dengan sesekali disodorkan pada pendatang, tanpa ekspresi penawaran, apalagi usaha memikat calon pembeli. Perilaku ini sangat berbeda dengan cara Ny Khotijah (42 tahun, janda, ibu dari 3 anak, pedagang, Bugis, 6 tahun tinggal di Agast, suaminya hilang/dibunuh oleh suku pedalaman saat mengantar dagangan ke pedalaman) menawarkan dagangannya. Wanita Bugis ini bahkan berani menahan barangnya ketika penawaran mendekati harga yang dia tentukan (Agast, 1988).

"memutar" uang inilah yang memungkinkan pendatang mampu berkembang dalam bidang ekonomi. Para pendatang ini memiliki ketrampilan dagang sehingga mampu meraih nilai tambah yang tinggi dalam waktu yang pendek. Tidak terlalu berlebihan jika orang Irian asli melihat etnis Bugis, Buton dan Makasar oleh orang asli Irian Jaya disebut sebagai "orang-orang Cina" karena pendatang ini menguasai perekonomian di propinsi itu (Loekman Soetrisno, 1996:2). Perasaan tidak senang terhadap kelompok pendatang, terutama Bugis, Buton dan Makasar ini muncul karena kecilnya peluang ekonomi penduduk asli dalam pasar lokal.

Data berikut menunjukkan bagaimana peluang ekonomi yang tercermin dari karakteristik pedagang yang ada dalam pasar Abepura.

Tabel : 4
Karakteristik Pedagang di Pasar Abepura

| Karakteristik | Bukan Irian | Irian Asli |
|--------------------------|-------------|------------|
| 1. Jumlah Pedagang | 300 | 100 |
| 2. Pedagang menurut seks | | |
| 2.1. Laki-laki | 130 | 25 |
| 2.2. Perempuan | 170 | 75 |
| 3. Tempat Berdagang | | |
| 3.1. Los Pasar | 125 | 25 |
| 3.2. Kios Pasar | 100 | 0 |
| 3.3. Emper Pasar | 75 | 75 |
| 4. Sumber Modal | | |
| 4.1. Uang Pribadi | 70% | 90% |
| 4.2. Pinjaman Famili | 5% | 2% |
| 4.3. Pinjaman Bank | 25% | 8% |
| 5. Pemilikan Tabungan | | |
| 5.1. Tabungan di Bank | 30% | 5% |
| 5.2. Tabungan di Rumah | 20% | 10% |

Sumber : Diolah dari Kakisina (1993:13).

Dari data di atas nampak jelas bahwa di pasar Abepura jumlah pedagang pendatang lebih besar dari pedagang asli Irian, fasilitas perdagangan permanen

dalam pasar Abepura didominasi oleh pedagang pendatang dan dimanfaatkannya lembaga keuangan yang ada oleh pedagang bukan asli Irian. Ini berarti pedagang pendatang di pasar Abepura memiliki kemampuan memanfaatkan peluang ekonomi lebih baik dari penduduk asli, baik dalam pemanfaatan fasilitas yang dibangun pemerintah (los, kios dan emper pasar) dan kemampuan pemanfaatan fasilitas kredit modal dari bank. Dalam situasi yang demikian pedagang asli Irian secara struktural tidak banyak memiliki peluang untuk dapat menandingi dominasi ekonomi para pedagang pendatang, terutama dari Bugis, Buton dan Makasar (BBM) ini.

Dominasi ekonomi pendatang melalui pasar lokal dalam suatu masyarakat yang majemuk seperti di Irian Jaya ini paling tidak dilakukan melalui penguasaan atas tiga hal:

(1) penguasaan para pendatang atas berbagai barang yang dihasilkan oleh penduduk asli.

Berbagai produk yang dihasilkan oleh penduduk asli Irian Jaya harganya dikontrol oleh para pedagang pengumpul yang pada umumnya adalah pendatang. Pedagang pengumpul ini mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda dari penjualan kembali barang tersebut sehingga akumulasi modal pada kelompok pedagang ini menjadi makin besar, sementara penduduk asli tidak mendapatkan banyak keuntungan ekonomi dari barang produksinya. Kekuatan para pedagang terhadap produsen lokal ini tidak hanya terhadap barang komoditas pertanian, tetapi juga pada barang produksi lokal lainnya.

(2) penguasaan para pendatang atas berbagai barang yang dibutuhkan oleh penduduk asli sebagai sarana produksi.

Meskipun banyak input produksi, terutama produksi pertanian yang dipasarkan oleh instansi pemerintah, tetapi

dalam kenyataannya pedagang pendatang lebih banyak mampu memainkan kontrol atas berbagai sarana produksi ini. Penguasaan ini antara lain dilakukan melalui kolusi antara pengusaha asli Irian Jaya dengan para pedagang pendatang. Para pedagang pendatang yang sangat paham dengan liku-liku bisnis dengan pemerintah menggunakan pengusaha asli Irian untuk meraih proyek yang kemudian meninggalkan pengusaha asli itu dengan pemberian komisi. Pada sarana produksi yang lain, misalnya kesempatan mendapatkan fasilitas perdagangan, ketidakmampuan pedagang lokal mengelola bisnis menyebabkan hak pemilikan atas sarana perdagangan ini segera beralih ke pedagang pendatang, sementara itu pedagang asli Irian makin tersisih dari pusat kegiatan ekonomi. Penguasaan modal angkutan juga terpusat ditangan para pendatang, sehingga kontrol arus barang sangat ditentukan para pendatang. Sebagian besar kapal perintis yang masuk ke pedalaman penuh dengan pedagang pendatang yang menggunakan kapal perintis itu tidak hanya sebagai alat angkut komoditas dagangan tetapi juga sebagai "pasar" terapung yang berpindah-pindah.

(3) penguasaan para pendatang atas berbagai barang kebutuhan pokok yang diperlukan penduduk asli untuk hidup sehari-hari.

Kontrol atas harga dan penyediaan sembilan bahan pokok memang berada di tangan Pemerintah. Akan tetapi kemampuan bisnis para pedagang pendatang dan luas dan sulitnya medan yang ada menyebabkan kemampuan aparat pemerintah yang terbatas, tidak mampu mengontrol penyediaan dan harga sembilan kebutuhan pokok ini. Dilain pihak, perkembangan yang terjadi telah banyak menggeser masyarakat Irian Jaya pada pola hidup yang lebih tergantung pada sembilan bahan pokok tersebut dari pada bahan lokal. Akibatnya, mekanisme pasar

yang terjadi sangat ditentukan oleh para pedagang pendatang yang mendominasi pengadaan dan pemasaran sembilan kebutuhan pokok tersebut.

Kelangkaan Peluang Ekonomi dan Konflik Etnik

Kesenjangan antara pendatang dan penduduk asli menjadi makin berlipat ganda karena ketidakmampuan penduduk asli merespon pembangunan ekonomi yang selama ini dilaksanakan. Hal ini terutama disebabkan karena bekerjanya mekanisme dampak saring (*filtering effect*). Para pendatang dengan berbagai keunggulan kompetitifnya dihadapan penduduk asli, mampu mendapatkan peluang (politik dan ekonomi) lebih banyak. Akibatnya "tetesan ke bawah kue pembangunan" sebagian besar tertahan dalam kelompok ini, sedangkan penduduk asli yang jumlahnya lebih besar hanya mendapatkan bagian yang kecil. Mekanisme dampak saring ini juga mengakibatkan akumulasi aset ekonomi pada sekelompok kecil pendatang yang terus meningkat berhadapan dengan makin tersisihnya penduduk asli dari berbagai peluang ekonomi yang ada.

Bekerjanya mekanisme dampak saring dan dominasi ekonomi para pendatang tersebut terutama terjadi di pasar, sehingga pasar dipandang sebagai simbol dominasi kaum pendatang. Oleh sebab itu, dalam banyak kasus kerusakan yang bermotif persaingan ekonomi di Irian Jaya pada umumnya pasar dan prasarana ekonomi merupakan sasaran utama untuk dihancurkan (Loekman Soetrisno, 1996:2).

Pembakaran pasar Abepura hanyalah salah satu dari serentetan kerusakan yang terjadi di Irian Jaya. Dalam memahami kerusakan yang terjadi di Abepura sebenarnya terdapat banyak faktor yang melatar belakangnya. Meskipun demikian, kelangkaan peluang ekonomi merupakan salah satu sebab mendasar yang berada dibalik banyak konflik etnik pada masyarakat yang

multietnik (Boedhi, 1993). Konfigurasi berbagai faktor itu secara bersama-sama telah menghasilkan suatu kerawanan sosial yang sangat peka. Konflik antar etnik dapat dengan mudah tersulut dengan pematik hal kecil yang sangat sederhana.⁵ Penulis mengalami sendiri bagaimana penduduk Suku Asmat di Desa Surui Kecamatan Agast, Merauke menjajakan patung-patung dengan malu-malu. Patung itu hanya dibawa kesana kemari dengan sesekali disodorkan pada pendatang, tanpa ekspresi penawaran, apalagi usaha memikat calon pembeli. Perilaku ini sangat berbeda dengan cara Ny Khotijah (42 tahun, janda, ibu dari 3 anak, pedagang, Bugis, 6 tahun tinggal di Agast, suaminya hilang/dibunuh oleh suku pedalaman saat mengantar dagangan ke pedalaman) menawarkan dagangannya. Wanita Bugis ini bahkan berani menahan barangnya ketika penawaran mendekati harga yang dia tentukan (Agast, 1988).

Kelangkaan peluang ekonomi sangat berkaitan dengan kehidupan masyarakat Irian Jaya. Hampir semua jaringan pemasaran dan peluang ekonomi berada dibawah kontrol para pendatang sedangkan aparat pemerintah tidak mampu berbuat banyak dalam menghadapi masalah tersebut. Keterbatasan aparat pemerintah dalam menangani masalah ini antara lain disebabkan karena keterbatasan aparat, dana, perangkat kerja dan sebagainya menghadapi medan yang berat dan bervariasi. Keterbatasan ini menyebabkan aparat pemerintah mengalami kegagalan untuk bertindak sebagai pembagi sumber daya alam yang adil dalam masyarakat (Loekman Soetrisno, 1996:3).

Dengan meminjam konsep Peter M Blau (Nasikun, 1989:5), dibalik kerusuhan yang terjadi di Irian Jaya selama ini sebenarnya telah terjadi konsolidasi parameter struktur sosial. Diferensiasi berdasarkan etnik jatuh berhimpitan dengan berbagai parameter lain sehingga cenderung berkembang saling

menguukuhkan. Konsolidasi parameter struktur sosial ini membuat konflik etnik menjadi makin berdimensi luas dan tanpa adanya perubahan secara struktural yang mendasar yang dapat merombak konfigurasi parameter itu, sangat mustahil konflik etnik dapat diselesaikan.

Beberapa parameter lain yang diperkirakan memberikan kontribusi besar dalam menopang diferensiasi berdasar suku bangsa itu antara lain penguasaan lapangan ekonomi, tingkat kemampuan manajerial, kemampuan wiraswasta, penguasaan fasilitas ekonomi, tingkat aksesibilitas atas berbagai pelayanan publik, agama, bahasa, tingkat pendidikan formal. Bekerjanya konsolidasi parameter struktur sosial yang melatar belakangi berbagai konflik etnik di Irian Jaya itu dapat ditampilkan dalam tabel 5.

Dalam kasus Irian Jaya, pedagang pendatang golongan etnis Cina tidaklah sedominan pendatang dari Bugis, Buton, Makasar dan Jawa. Meskipun menguasai perdagangan tetapi keberadaannya tidak banyak menimbulkan masalah karena selain jumlahnya relatif kecil, bidang ekonomi yang dikelola terbatas, pada umumnya pedagang Cina lebih banyak pada posisi pedagang perantara antar daerah dan pengumpul yang pada umumnya tidak secara langsung berhadapan dengan penduduk asli.

5) Berbagai kerusuhan yang terjadi di Irian Jaya selama ini pada umumnya bersumber pada hal-hal kecil. Kerusuhan di Timika dimulai dengan adanya isu tewasnya warga suku Amunge oleh kendaraan proyek Freeport. Kerusuhan di Bandara Sentani dimulai dengan gagalnya massa menyambut jenazah Thomas Wanggai. Kerusuhan di pasar Abepura bermula dari cegatan aparat keamanan terhadap massa yang mengejar mobil ambulans pembawa jenazah Wanggai ke Jayapura. Semua itu hanyalah merupakan pematik kecil bagi ledakan konflik etnik, yang mampu meledakkan berbagai perasaan tidak senang terhadap para pendatang, perasaan tersisih dan kalah dalam persaingan terutama dalam lapangan ekonomi.

Tabel: 5

**Berbagai Parameter Struktur Sosial
yang Diperkirakan Melatar-belakangi Konflik Etnik
di Irian Jaya**

| Parameter | Etnik/Suku Bangsa | |
|---|--------------------------|---|
| | Penduduk Asli | Pendatang |
| Etnik/ Suku Bangsa | Irian (49 suku) | Bugis, Buton, Makasar, Jawa |
| Lapangan Ekonomi yang Diskusai | Sektor Tradisional | Sektor Modern |
| Kemampuan Manajerial | Rendah | Tinggi |
| Kemampuan berwiraswasta | Lemah | Kuat |
| Penguasaan fasilitas Ekonomi | Sedikit | Banyak |
| Penguasaan pemasaran hasil produksi | Lemah | Kuat |
| Penguasaan pemasaran sarana produksi | Lemah | Kuat |
| Penguasaan pemasaran kebutuhan pokok | Lemah | Kuat |
| Tingkat Aksesibilitas Pelayanan Publik | Rendah | Tinggi |
| Agama (mayoritas) Bahasa sehari-hari | Non Islam Lokal Irian | Islam Lokal Bugis, lokal Buton, Lokal Makasar, lokal Jawa |
| Tingkat Pendidikan Formal rata-rata | Rendah | Sedang |

Dengan kemungkinan ini maka diduga, sangat kecil terjadi persinggungan kepentingan ekonomi secara langsung antara etnis Cina dengan penduduk asli Irian, atau ada faktor lain yang mampu mereduksi kemungkinan timbulnya konflik antar dua etnik ini, misalnya kesamaan agama sebagai dasar terjadinya interseksi parameter struktur sosial.

Interseksi parameter struktur sosial juga mampu meniadakan konflik antara etnik Irian asli dengan pendatang dari Maluku yang bersumber dari parameter agama. Aditjondro (1987) melihat bahwa banyak aktifitas yang bersifat keagamaan yang dapat dilakukan secara bersama antara orang Irian dengan orang Maluku sehingga agama menjadi faktor yang mereduksi konflik. Sungguhpun demikian satu hal yang penting adalah bahwa orang Maluku tidak memainkan peranan yang cukup berarti dalam perekonomian. Artinya, bagi orang Irian asli, pendatang Maluku tidak sedominan Bugis, Buton dan Makasar dalam lapangan ekonomi. Hal yang kurang lebih sama juga terjadi antara etnis Irian dengan etnis pendatang dari Sulawesi Utara yang mayoritas beragama Non-Islam. Dengan demikian dapat dipahami bagaimana parameter agama ini secara relatif bukan parameter kunci dalam konflik etnik, terutama di Irian Jaya.

Parameter agama memang bukan parameter utama yang mendasari konflik etnik, Boedhi (1993:19-20) dengan mengambil kasus Yugoslavia menyimpulkan bahwa konflik antar etnis yang berkembang pada umumnya dipandang konflik antar agama, akan tetapi sebenarnya antar etnik itu pernah hidup rukun, bersatu, dengan agama yang berbeda. Kunci utamanya justru terletak pada masalah ekonomi, dimana kelangkaan sumber dan peluang ekonomi yang terjadi menggiring pada sikap menguasai dan memperebutkan sumber-sumber ekonomi yang ada sehingga dapat meledak menjadi konflik etnik. Boedhi juga melihat contoh kasus lain yang terjadi

Irlandia Utara dimana kesenjangan ekonomi antara orang Katolik dan Protestan yang mendominasi berbagai bidang, termasuk kekuasaan eksekutif, telah menyulut terjadinya konflik etnik di Irlandia Utara.

Parameter tingkat aksesibilitas pelayanan publik barang kali menjadi parameter yang penting untuk diperhatikan dalam kaitannya dengan peranan pemerintah. Dalam hal ini fungsi utama pemerintah adalah membagi sumberdaya yang ada secara adil (Loekman Soetrisno, 1996:3). Kelemahan pemerintah dalam hal ini menyebabkan bekerjanya "hukum rimba" dimana etnik yang kuat akan menggusur peluang etnik yang lemah. Keunggulan kompetitif para pendatang terhadap penduduk asli Irian Jaya sangat jelas mengarah ke proses ini. Bekerjanya mekanisme dampak saring memperlebar kesenjangan sosial ekonomi yang telah ada. Sementara itu, Loekman Soetrisno (1996:4) melihat bahwa peranan Pemerintah Daerah dalam menghadapi masalah sosial ekonomi di Irian Jaya masih sangat lemah. Kecenderungan yang ada segala masalah yang muncul di Irian sangat tergantung pada bagaimana Pemerintah Pusat (Jakarta) melihat dan memecahkannya. Ketika masalah berkembang kian luas dan kronis, pengalaman selama ini menunjukkan, penyelesaian yang datang dari Pusat (Jakarta) sering terlambat. Sebagai contohnya, dalam kasus Abepura, GATRA (30 Maret 1996) menulis "Abepura Terpengang, Aparat Keamanan Konon Terlambat Mengantisipasi Keadaan".

Kesenjangan ekonomi antara penduduk asli dan pendatang akan selalu diikuti dengan kesenjangan dalam bidang yang lain, termasuk juga dominasi dalam bidang politik, baik langsung maupun tidak langsung. Dominasi langsung berarti pengambilan keputusan politik ditentukan oleh para pendatang itu sendiri, sedang tidak langsung jika pengambilan keputusan politik itu dilakukan bukan oleh pendatang,

tetapi pada implementasinya memberikan keuntungan besar bagi kepentingan politik para pendatang.

Logikanya, dengan mendominasi dan memonopoli kekuasaan politik maka pihak yang dominan akan melindungi dan mengembangkan kekuatan ekonominya sendiri, dan mengabaikan kelompok etnik yang lain. Masuknya kekuasaan politik kolonial ke Indonesia melalui VOC, terdusurnya Suku Aborigin di Australia merupakan produk dari proses ini. Dominasi politik dengan demikian menjadi faktor penting dalam melanggengkan kesenjangan sosial. Dalam kasus Irian Jaya, lemahnya kemampuan pemerintah akan dapat berarti tidak mudah mematahkan dan meniadakan kesenjangan ini. Jika hal ini terus berlangsung, sangat sukar bagi penduduk asli Irian Jaya untuk dapat bangkit, mengejar ketertinggalannya dari suku bangsa lain di Indonesia, dan itu berarti ada yang kalah dalam persaingan yang makin sengit:

Masa Depan Konflik Etnik di Irian Jaya: Beberapa Skenario Teoritik

Walaupun Kawasan Timur Indonesia telah banyak mendapatkan perhatian para pengambil keputusan politik di Jakarta, akan tetapi implementasi kebijaksanaan itu masih jauh dari keberhasilan memecahkan masalah dan mencari jalan keluar dari persoalan yang timbul di Irian Jaya. Keputusan politik di tingkat Pusat pada umumnya sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, misalnya kepentingan Pusat atas Daerah, pengembangan investasi, stabilisasi politik, aspirasi *interest group*, dan juga kepentingan daerah itu sendiri. Pada kenyataannya, berbagai kebijakan itu masih belum mampu menyentuh permasalahan yang ada dan berkembang di Irian Jaya dewasa ini.

Jika permasalahan yang ada di Irian Jaya terus berlangsung maka beberapa kemungkinan yang berkaitan dengan

konflik etnik akan dapat terjadi. Setidaknya secara teoritik ada dua skenario tentang masa depan konflik etnik di Irian Jaya yang dapat terjadi.

Skenario 1 : Berkobarnya Perang Etnik dan Gerakan Separatis

Asumsi yang mendasari skenario ini adalah bahwa dominasi politik ekonomi menggusur penduduk asli dari partisipasi ekonomi dan politik sehingga kehidupan dan penghidupan penduduk asli terancam. Dengan memakai konsep Robhuskha dan Shepsle (1972), masyarakat Irian Jaya akan mengembangkan preferensi etnisnya sebagai garis batas yang membedakan antara "kita" dan "mereka". Karena sentimen primordial yang muncul dari etnisitas ini kemudian diartikulasikan secara politik maka etnik bergeser bukan sekedar kesatuan masyarakat yang memiliki budaya tertentu, tetapi menjadi organisasi politik tertentu, yang bergerak sepanjang garis etnik (politik etnik).

Ti adanya lembaga yang dapat menjadi perantara dan rendahnya kemampuan membangun koalisi akan membuat konflik mudah meledak. Kecurigaan etnik yang bersumber dari sejarah dan hubungan sosial yang timpang selama ini menjadi salah satu hambatan bagi terjadinya komunikasi politik antar etnik. Di lain pihak, misionaris sebagai lembaga yang telah cukup lama mendominasi kehidupan etnik di Irian Jaya tidak dapat berfungsi optimal karena adanya parameter agama yang berbeda diantara penduduk asli dan pendatang:

Kehidupan politik menjadi sangat labil. Keputusan politik yang mengabaikan kepentingan politik salah satu pihak akan dapat menimbulkan konflik etnik yang berkepanjangan. Hadirnya *force* (dalam hal ini ABRI) memang dapat mereduksi konflik, akan tetapi sifatnya hanya sementara dan untuk keperluan ini dibutuhkan energi yang luar biasa besar. Jika kemampuan *force* melemah (misalnya lemahnya kekuatan ekonomi negara untuk

menunjang operasi ABRI), konflik akan segera mencapai puncaknya dalam bentuk kerusuhan dan bahkan menjadi perang antar etnik. Dalam situasi yang demikian, perang antar etnik akan segera berubah menjadi *all out war*, dimana segala cara dipergunakan untuk memenangkan peperangan tersebut.

Jika tidak banyak perubahan dilakukan, skenario I ini dapat menjadi kenyataan. Kecenderungan yang mengarah ke skenario I ini telah cukup nampak, misalnya mulai meningkatnya tensi ketegangan etnik yang menempatkan semangat "Melanesia Raya" sebagai dasar moral gerakan. Dalam kasus kerusuhan di Abepura, ditemukan kasus perobekan bendera Merah Putih, pengibaran bendera Bintang Kejora (bendera OPM), pengeluaran tokoh GPK yang meninggal (Thomas Wanggai), meneriakkan yel "Papua Merdeka" dan sebagainya. Serentetan bukti ini hanyalah sepotong pengungkapan ekspresi konflik, sedangkan pembakaran pasar Abepura merupakan penghancuran simbol dominasi. Cara-cara penyanderaan yang dilakukan GPK merupakan salah satu cara untuk memenangkan *all out war*, karena kekuatan militer yang tidakimbang antara GPK dengan ABRI, selain untuk menarik perhatian masyarakat internasional.

Tuntutan untuk mendapatkan otonomi yang lebih besar bagi wilayah Irian Jaya akan menjadi bagian dari perjuangan masyarakat Irian Jaya untuk mendapatkan perlakuan yang lebih baik dan adil. Jika tuntutan otonomi yang lebih luas ini terhambat, bukan tidak mungkin tuntutan yang lebih keras akan muncul, yaitu melepaskan diri dari negara Republik Indonesia dan mendirikan negara Papua Merdeka. Walaupun kecenderungan ke arah gerakan separatisme ini lemah, antara lain karena kekuatan yang tidakimbang, kurangnya dukungan internasional dan diantara penduduk asli Irian Jaya sendiri tidak menginginkan ke arah itu, namun jika perlakuan yang lebih

baik dan adil tidak diperoleh bukan mustahil akan dapat terjadi. Telah cukup banyak putra asli daerah Irian yang mengenyam pendidikan, bahkan pendidikan di luar negeri sehingga bukan mustahil kemampuan untuk memegang kekuasaan dapat dilakukan. Apalagi jika ada negara asing yang tertarik pada sumber daya alam yang terkandung di Irian Jaya, tetapi dalam posisi konflik dengan Jakarta, kemudian tergerak untuk mendukung gerakan ini, maka munculnya Papua Merdeka bukan hal yang tak mungkin.

Skenario II : Integrasi Semu

Oleh karena kekayaan alamnya yang cukup besar sedangkan pada saat yang sama sumber alam di pulau lain telah terkuras, Pemerintah Indonesia menempatkan Irian Jaya sebagai wilayah yang perlu "digarap" untuk menopang perekonomian negara yang makin sulit karena berbagai sebab. Dengan kebijaksanaan ini, energi diarahkan ke wilayah Irian Jaya. Pembinaan administrasi pemerintahan dilakukan secara efektif, kekuatan militer ditingkatkan untuk mendukung stabilitas politik dan ekonomi, sedangkan sarana prasarana dibangun untuk menunjang misi utama tersebut. Dalam skenario II ini berarti terjadi ekspansi besar-besaran dari pusat ke daerah karena berbagai sebab, terutama motif ekonomi.

Perkembangan wilayah Irian Jaya memang akan meningkat pesat akan tetapi permasalahan mendasarnya belum tentu tersentuh. Hal ini akan membawa konsekuensi antara lain demi kepentingan pemerintah pusat maka kepentingan lokal dapat diabaikan, pengurusan sumber-sumber ekonomi lokal secara besar-besaran akan dilakukan tetapi hanya sedikit yang dialokasikan kembali ke wilayah ini. Pelestarian hubungan sosial yang sekarang ada cenderung dilakukan. Itu berarti aksesibilitas penduduk asli tetap saja rendah sedangkan pendatang akan

mendapatkan peluang ekonomi dan keuntungan yang makin jauh lebih besar. Artinya, kesenjangan akan makin terbentang lebar.

Jika hal itu terjadi maka sebenarnya stabilitas politik dan ekonomi yang ada sifatnya semu. Meminjam istilah Furnival (Shepsle, 1972) integrasi sosial yang melibatkan beberapa etnik itu sebenarnya terjadi melalui paksaan (*coercion*) suatu kelompok yang dominan terhadap kelompok lain yang tidak dominan. Dalam kasus Irian Jaya, integrasi itu dilakukan dengan memanfaatkan kekuatan (*force*) dan mengakomodasi berbagai kepentingan lokal agar mudah dikontrol oleh Pusat.

Kooptasi berbagai kekuatan politik lokal dilakukan untuk mematahkan berbagai tuntutan yang tidak searah dengan yang dikehendaki pemerintah Pusat. Proses ini dilakukan dengan mengembangkan sistem perwakilan kepentingan melalui organisasi fungsional non-ideologis, atau proses korporatisme negara (Mas'ood, 1994:131). Dalam sistem seperti ini unitnya terbatas, tunggal, keanggotaan sifatnya wajib, tidak saling bersaing, diatur secara hirarkhis, rekrutmen berdasarkan fungsi atau profesi, memonopoli perwakilan kepentingan dalam bidang tertentu, mendapat pengakuan dan bahkan diciptakan sendiri oleh pemerintah dan dikendalikan oleh pemerintah. Menurut Schmitter (Mas'ood, 1994:132) model ini dirancang untuk meniadakan konflik, menciptakan hubungan antara negara dan masyarakat yang harmonis, serasi, penuh solidaritas dan kerjasama.

Jika skenario II ini yang berjalan maka penduduk asli Irian Jaya akan berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Hubungan antar etnik yang timpang akan tetap berjalan karena adanya paksaan dan ketidak mampuan penduduk asli untuk melawan paksaan tersebut. Setiap usaha untuk melawan akan dituduh "subversif", "mengganggu

stabilitas" dan sebagainya. Ini dapat dipahami karena strategi yang dipergunakan dalam proses ini adalah "meminimalisasi konflik dan memaksimalkan pertumbuhan" (Mas'ood, 1994:131). Dalam kondisi seperti ini masyarakat asli Irian Jaya akan berada di pinggiran dan menerima nasibnya karena tidak ada kekuatan yang mampu merubah keadaan. Dalam situasi seperti itu tidak banyak yang dapat diharapkan, tetapi bukan mustahil muncul kepercayaan yang sangat kuat akan datangnya "ratu adil", suatu kepercayaan yang secara kultural telah sejak lama ada dalam atmosfer pemikiran masyarakat timur, terutama yang "tertindas".

Kemungkinan lain dalam skenario II ini adalah meningkatnya jumlah pelintas batas ke negara tetangga, Papua Nugini. Pelintas batas tradisional barangkali sejak lama telah terjadi dan tidak banyak masalah yang muncul selama ini. Masalahnya menjadi lain jika membanjirnya penduduk Irian Jaya ke Papua Nugini ini berkaitan dengan motif ekonomi dan perasaan tergusur serta kalah dalam persaingan. Masuknya pendatang ilegal ke Papua Nugini ini akan membawa akibat tersendiri bagi negara tetangga tersebut, bukan tidak mungkin akan menimbulkan ketegangan diantara Indonesia dan Papua Nugini. Kasus yang sama dialami oleh negara-negara Eropa Barat ketika negara-negara sosialis dan Uni Soviet pecah atau ketika dua Jerman Bersatu.

Barangkali masih ada beberapa skenario lain yang berkaitan dengan masa depan konflik etnik di Irian Jaya. Sangat disadari bahwa skenario ini hanyalah suatu rekaan teoritik, akan tetapi juga dapat menunjukkan betapa rumitnya masalah dan betapa banyak kemungkinan yang bakal terjadi.

Penutup

Berbagai kerusuhan di Irian Jaya selama ini memiliki sumber masalah yang

mendasar yaitu tergesurnya penduduk asli Irian dari para pendatang. Selain itu, berbagai kebijakan pembangunan tidak banyak membuka peluang perbaikan keadaan struktural yang timpang ini. Kemampuan politik daerah sangat terbatas dan dibatasi oleh kuatnya kekuasaan pusat. Kekalahan dalam persaingan ekonomi telah membawa konflik etnik pada dimensi yang lebih luas.

Untuk mengatasi masalah yang kronis ini banyak hal harus dilakukan. Bukan sekedar mengalokasikan lebih banyak dana dan program pembangunan ke Irian Jaya atau menggerakkan ABRI untuk meredam konflik, tetapi diperlukan upaya menyeluruh. Pemberdayaan (*empowerment*) penduduk asli dalam berbagai bidang mutlak diperlukan agar penduduk asli memiliki *competitive advantage* yang lebih baik dan mampu bersaing dengan pendatang. Pengurusan sumber alam Irian Jaya harus secara adil dilakukan dan hasilnya secara proporsional direlokasikan kembali ke wilayah itu untuk membangun daerah yang sekarang ini telah sangat jelas tertinggal dari wilayah lain. Namun apakah *political will* untuk ini ada?

Daftar Pustaka

- Aditjondro, George J, Kristian Ansaka, Abner Korwa, "Why People Flock to Sorong" dimuat dalam "Indonesia Repoort-Culture & Society Supplement", No.2 June 1987.
- Boedhi, S " Mengelola Masyarakat Multi-etnik Dalam Sebuah Negara Bangsa (Etat Nation)", dimuat dalam "Kritis" Jurnal UKSW Salatiga, Nomer 2, Oktober Desember 1993.
- Harry, Paul "Birokrasi Dalam Pembangunan Pertanian di Irian jaya", dimuat dalam "Kritis" Jurnal UKSW Salatiga, Nomer 4 Tahun V, April, 1991.
- Kakisina, Stephen, "Strategi Pengembangan Kewirausahaan di Irian Jaya" dimuat dalam " Kritis" Jurnal UKSW Salatiga, Nomer 3, Tahun VII, Januari-Maret 1993.
- Mas'oeed, Mochtar "Politik Birokrasi dan Pembangunan", Penerbit Pustaka Pelajar, Cetakan I, Yogyakarta.
- Nasikun "Mencari Landasan Teoritik Demokrasi Pancasila : suatu Tinjauan sosiologis", Makalah Seminar Bulanan Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan, UGM, Yogyakarta, 9 September 1989.
- , 1994 "Sistem Sosial Indonesia", Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik, UGM Yogyakarta.
- Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada, "Analisa Perkembangan Kependudukan menurut Sensus Penduduk 1990 : Dinamika Mobilitas maluku Irian jaya", Kerjasama Pusat Penelitian kependudukan Universitas Gadjah Mada dengan kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup", Yogyakarta, 1992/1993.
- Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan UGM " Pengembangan Kawasan Terpadu sebagai Program Penanggulangan Kemiskinan Studi Evaluasi Yogyakarta, 1994
- Rachbini, Didik, J ". Kemiskinan di Indonesia" dimuat dalam "Profil Indonesia", Jurnal tahunan CIDES, Nomer 1/1994, Center for Information and Development studies (CIDES), Jakarta.
- Sheppsle, Kennet A, and Alvin Robuskha "Politik in Plural societies-A Theory of Democratic Instability", Charles E Merrill Publishing Company, Columbus, Ohaio.
- Singian, Hayaruddin, "Kelemahan dalam Membangun Irian Jaya" dimuat dalam "masyarakat Indonesia", Jilid XIII, Nomer 2, LIPI, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono " Sosiologi suatu

-Pengantar", Penerbit Gramedia, Jakarta.

Soetrisno, Loekman " *The Problematic Role of Transmigration in the Social and Political stabilization of Broader Areas : The Case of Irian Jaya*", dimuat dalam "Indonesia Repport-Culture & Society Supplement", No. 2 December 1986.

-----, 1996, "Beberapa Pemikiran Untuk Pembangunan Transmigrasi di Irian Jaya", bahan Diskusi Panel Terbatas " Pendekatan Sosial Budaya " Pembangunan Transmigrasi di Propinsi Irian Jaya", Ditjen Bina Masyarakat Transmigrasi, Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan, Jakarta, 26-27 Maret 1996.

Taneko, Soelaeman B " *Konsepsi Sistem Sosial dan Sistem Sosial Indonesia*", Penerbit Fajar Agung, Jakarta.

Majalah dan Surat Kabar

GATRA

20/1/1996 "Drama Gerakan Kelly Kwalik"

20/1/1996 " Pembebasan Tempo Dulu"
20/1/1996 " Aksi Lintas batas OPM"
27/1/1996 "Bila Sandera di tangan Preman Hutan"
27/1/1996 "Marthin Tabu sampai Kelly Kwalik"
27/1/1996 " Kwalik di Medan Penculikan"
27/1/1996 " Kipasan Belanda yang Merepotkan"
30/3/1996 " Wanggai Kena Kanker, Abepura Kena bakar"
30/3/1996 " Irian jaya Dalam sejumlah Dugaan"
30/3/1996 " Ibarat Kayu Dibasahi Minyak"

KOMPAS

Selasa, 19/3/1996 :Kerusuhan Terjadi di Kota Abepura "
Rabu, 20/3/1996 "40 Perusuh di Abepura Ditahan"
Jumat, 22/3/1996 " Pangdam Minta bantuan Tokoh Masyarakat Irja"
Sabtu, 23/3/1996 " Kasum ABRI tak Tuduh LSM Mendalangi Kerusakan di Irja"
Selasa, 9/4/1996 " Antara Kota dan Desa"
Rabu, 10/4/1996 " Penonton Abadi di Kampungnya"